

Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Abdul Rahman*, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, Irwan Tahir

Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

*Correspondence: rahman.ip777@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran krusial yang dimainkan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan utama yang mendapat perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuan pembangunan ini mengejar keseimbangan penting antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Melakukan berinteraksi langsung dengan para pemimpin Ormas dan LSM selama survei lapangan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran Ormas dan LSM dalam konteks lokal yang bervariasi dan memberikan pandangan holistik tentang kontribusi mereka dalam pembangunan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ormas dan LSM memiliki potensi besar dalam memobilisasi masyarakat, mengadvokasi kebijakan yang lebih baik, dan memberikan layanan yang diperlukan bagi warga masyarakat. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk masalah keuangan, kapasitas organisasi, dan hubungan dengan pemerintah, beberapa strategi pemberdayaan yang dapat digunakan untuk memperkuat peran Ormas dan LSM dalam proses pembangunan, antara lain, meningkatkan kapasitas organisasi, mempromosikan kemitraan dengan sektor swasta, dan memperkuat jejaring antar-organisasi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Ormas dan LSM dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: pemberdayaan, organisasi masyarakat, LSM, pembangunan, Indonesia

ABSTRACT

This research discusses the crucial role played by Community Organizations and Non-Governmental Organizations in efforts to achieve sustainable development in Indonesia. Sustainable development is the main goal that has received serious attention from various countries, including Indonesia. These development goals pursue an important balance between economic growth, environmental sustainability, and community empowerment. The method used is a qualitative approach involving field surveys, interviews and document analysis. Interact directly with leaders of Community Organizations and Non-Governmental Organizations during field surveys. This method is used to gain a deeper understanding of the role of Community Organizations and Non-Governmental Organizations in varied local contexts and provide a holistic view of their contribution to Indonesia's development. The research results show that Community Organizations and Non-Governmental Organizations have great potential in mobilizing the community, advocating for better policies, and providing necessary services for community members. However, there are challenges that need to be overcome, including financial issues, organizational capacity, and relations with government, several empowerment strategies that can be used to strengthen the role of Community Organizations and Non-Governmental Organizations in the development process, including increasing organizational capacity, promoting partnerships with the sector private sector, and strengthening inter-organizational networks. This research provides a deeper understanding of how Community Organizations and Non-Governmental Organizations can contribute more effectively in supporting sustainable development in Indonesia.

Keywords: empowerment, community organizations, non-governmental organizations, development, Indonesia

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi tujuan utama bagi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Ferrazzi, 2023; Fitriandari & Winata, 2021; Karjoko et al., 2022). Hal ini mencerminkan kesadaran global akan perlunya mencapai keseimbangan yang esensial antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, untuk tujuan pembangunan

berkelanjutan, dengan bijak menggarisbawahi bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan yang memandang pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai komponen yang tak terpisahkan dan harus diintegrasikan secara seimbang. Tanpa keseimbangan ini, pembangunan akan sulit berkelanjutan dalam jangka Panjang (Byrch et al., 2007; Carley & Christie, 2017; Duran et al., 2015; Jansen, 2003; Opschoor & Van der Straaten, 1993; Suharyani & Djumarno, 2023).

Pentingnya mencapai keseimbangan juga ditekankan dalam pembangunan berkelanjutan bahwa kesuksesan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara ini untuk menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan terhadap lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, peran Ormas (Organisasi Masyarakat) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai agen perubahan yang mendorong keseimbangan ini menjadi semakin penting. Pandangan tentang urgensi keberlanjutan terhadap lingkungan dalam konteks pembangunan juga diperkuat seorang ahli lingkungan, Carson (1962), yang menyatakan bahwa kehidupan di Bumi bergantung pada keseimbangan ekologi yang rapuh. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perlindungan lingkungan yang bijaksana agar sumber daya alam kita dapat bertahan untuk generasi mendatang.

Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan utama yang perlu diperkuat dan diperdalam. Salah satu faktor penting yang berkontribusi pada pencapaian tujuan ini Ormas dan LSM yang merupakan elemen penting dalam ekosistem pembangunan berkelanjutan di Indonesia karena mereka dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang dapat membantu mencapai berbagai tujuan pembangunan. Peran Ormas dan LSM dalam konteks pembangunan berkelanjutan tidak boleh diabaikan. Ormas dan LSM memiliki kemampuan unik untuk memobilisasi sumber daya manusia dan mendekatkan pembangunan pada masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran mereka juga membantu memastikan bahwa kebijakan pembangunan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ormas dan LSM dapat bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memainkan peran penting dalam membantu pemerintah menjalankan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Pada tahun-tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan berbagai Ormas dan LSM yang beroperasi di berbagai bidang, termasuk lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Ormas dan LSM telah terlibat dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, untuk memahami peran Ormas dan LSM dalam pembangunan berkelanjutan, penting untuk mengevaluasi kontribusi konkret mereka dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan utama yang perlu diperkuat dan diperdalam melalui penelitian dan tindakan nyata.

Kerangka Teori

Konsep Ormas dan LSM, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli, didasarkan pada gagasan bahwa Ormas dan LSM adalah bentuk organisasi yang fokus pada kepentingan masyarakat secara independen dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Ormas dan LSM memiliki peran krusial dalam mendorong perubahan sosial positif tanpa mengutamakan keuntungan pribadi (Holloway, 2011). Selain itu, teori masyarakat sipil juga mengartikan bahwa masyarakat sipil adalah suatu pergerakan sosial yang terorganisir dari berbagai lapisan masyarakat, yang melibatkan beragam individu dengan pandangan dan tujuan yang berbeda-beda, bahkan terkadang berlawanan (Zemans, 2004). Barnes (2006) menjelaskan bagaimana masyarakat sipil dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam konteks perkembangan sosial dan politik yang kompleks. Menurut Fowler (2013) yang mengklarifikasi tentang perbedaan antara Ormas dan Non-Organisasi. Organisasi masyarakat sipil: tidak dibentuk untuk menjadi organisasi yang mapan, tidak harus dibutuhkan, tetapi sebagai pilihan masyarakat yang secara sukarela untuk membantu masyarakat dalam hukum, dibentuk oleh individu yang mandiri dan bukan bagian dari pemerintah ataupun dikendalikan oleh suatu badan publik, organisasi masyarakat sipil ini mematuhi aturan undang-undang, mendaftarkan diri kepada pemerintah, dan mengola sumber daya ormas, tercatat sebagai organisasi untuk pengenalan sosial dan

menerima prinsip tanggung jawab sosial. Sedangkan NGOs (atau organisasi pengembangan dan kesejahteraan masyarakat) yaitu: suatu legitimasi di masyarakat yang lemah/miskin yaitu terjadi ketidakadilan dan Ormas dan LSM alami, melakukan aksi ketika adanya dukungan dan memberikan bantuan dana untuk masyarakat miskin, sebagian besar anggota beroperasi atas berbagai yang secara parsial (sebagian datang dari pemerintah dan sektor bisnis), didasarkan pada nilai-nilai sukarela

Ormas dan LSM merupakan bagian dari masyarakat sipil yang menurut Mouzelis (Halili, 2006) untuk turut menciptakan penegakan hukum yang efektif demi melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Kelompok-kelompok sipil yang dikelola secara kuat akan mampu melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang yang memegang kontrol terhadap administrasi dan sarana-sarana pemaksa. Ormas dan LSM menghadirkan keadaan pluralisme yang seimbang di antara kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga tidak adanya peluang salah satu pihak untuk mendominasi secara mutlak. Dari berbagai sudut pandang tersebut penulis melakukan kajian normatif dan kritis dalam membangun pengetahuan tentang bagaimana Ormas dan LSM berada di masyarakat yang akhirnya menjadi satu kekuatan dalam pembangunan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang telah terbukti efektif dalam menggali pemahaman yang mendalam tentang peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pembangunan. Pendekatan kualitatif memungkinkan kami untuk menjelajahi konteks yang kompleks dan dinamis yang melibatkan Ormas dan LSM dalam proses pembangunan di Indonesia. Dalam melaksanakan survei lapangan di berbagai wilayah Indonesia, penelitian ini mengikuti pendekatan holistik yang melibatkan interaksi langsung dengan para pemimpin Ormas dan LSM. Hal ini memungkinkan kami untuk mendapatkan perspektif langsung dari pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam upaya pembangunan lokal (Bordens & B, 2014). Wawancara mendalam dengan para pemimpin organisasi dan anggota aktif Ormas dan LSM juga menjadi elemen penting dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menggali pemahaman yang lebih kaya mengenai pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh Ormas dan LSM dalam menjalankan peran Ormas dan LSM (Yang et al., 2019).

Selain data primer yang diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara, analisis dokumen juga digunakan untuk mendokumentasikan perkembangan terbaru dalam pembangunan di Indonesia. Dokumen-dokumen ini termasuk kebijakan pemerintah, laporan pembangunan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Huberman & Miles, 2012). Penelitian ini juga merujuk pada literatur terkait yang telah diterbitkan oleh para ahli dan peneliti terdahulu. Referensi kepada penelitian dan pandangan ahli sebelumnya memberikan dasar teoretis yang kuat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Ormas dan LSM dalam konteks pembangunan di Indonesia (Creswell, 2012). Dengan menggabungkan berbagai metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontribusi, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh Ormas dan LSM dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Ormas dan LSM dapat berperan secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ormas dan LSM memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Peran mereka mencakup berbagai aspek penting, termasuk pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, partisipasi aktif masyarakat, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah. Temuan penelitian ini dapat diperluas dan dikembangkan melalui beberapa aspek kunci:

Pemberdayaan Masyarakat

Ormas dan LSM merupakan dua jenis organisasi masyarakat yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Mereka bergerak di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Mereka melakukan berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, fasilitasi, advokasi, pengawasan, dan lain-lain. Mereka bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, dan kemandirian masyarakat, khususnya

yang berada di daerah terpencil, miskin, atau tertinggal. Melalui upaya mereka yang beragam, Ormas dan LSM turut memainkan peran strategis dalam mengentaskan masalah sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 1,2 juta. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dari tahun 2019, yang menunjukkan bahwa Ormas dan LSM semakin berkembang dan aktif di Indonesia. Salah satu contoh Ormas yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat adalah Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan anggota sekitar 90 juta. NU memiliki program-program pemberdayaan masyarakat, seperti NU Peduli, yang memberikan bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. NU juga memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan demokrasi di desa-desa (Irawan, 2016; Irmayani et al., 2019). Salah satu LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat adalah Wahana Visi Indonesia (WVI), yang merupakan afiliasi dari World Vision International, sebuah organisasi kemanusiaan global (Wahana Visi Indonesia, 2023). WVI memiliki program-program pemberdayaan masyarakat, seperti Area Development Program (ADP), yang merupakan program pembangunan berbasis masyarakat yang berfokus pada anak-anak dan keluarga mereka di daerah tertentu (WVI International, 2023). WVI juga memiliki Child Sponsorship Program (CSP), yang merupakan program bantuan finansial dan pendampingan bagi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan (Wahana Visi Indonesia, 2023). *Save The Children Indonesia* merupakan LSM yang menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk membangun dan memberdayakan komunitas dimana terdapat anak-anak. LSM ini berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial. LSM ini memiliki program-program seperti Pendidikan Berkualitas, Kesehatan Ibu dan Anak, Perlindungan Anak dari Kekerasan, dan Tanggap Darurat Bencana (Save the Children, 2023). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan LSM yang berfokus pada pemberdayaan lingkungan hidup. LSM ini bergerak di bidang lingkungan, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi. LSM ini melakukan berbagai kegiatan, seperti advokasi, edukasi, kampanye, dan jaringan. LSM ini memiliki program-program seperti Gerakan Rakyat untuk Penyelamatan Lingkungan Hidup, Gerakan Anti Tambang, Gerakan Anti Pembangunan PLTA, dan Gerakan Anti Perkebunan Sawit (WALHI, 2023a). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan hukum. LSM ini berfokus pada bidang hukum, hak asasi manusia, keadilan, dan pemberantasan korupsi. LSM ini melakukan berbagai kegiatan, seperti bantuan hukum, pendampingan, penyuluhan, dan litigasi. LSM ini memiliki program-program seperti Bantuan Hukum Gratis, Pendidikan Hukum Masyarakat, Pengawasan Pemilu, dan Pengawasan Kasus Korupsi (LBH, 2023).

Dapat dikatakan bahwa Ormas dan LSM sudah menunjukkan peran penting mereka dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Mereka sudah dan masih melakukan berbagai inisiatif yang mengembangkan sektor-sektor yang strategis, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Selain itu, mereka tidak hanya memberikan bantuan, dukungan, dan fasilitasi kepada masyarakat, tetapi juga telah menciptakan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian individu dan kelompok masyarakat, serta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian ini konsisten dengan pandangan beberapa ahli pemberdayaan masyarakat, Ife (2013) menekankan pentingnya peran Ormas dan LSM dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil, miskin, atau tertinggal. Hardianto & Martono (2022) menyoroti kontribusi Ormas dan LSM dalam menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak. Di Vaio et al. (2022) mengungkapkan bahwa Ormas dan LSM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan daya saing masyarakat di bidang ekonomi, melalui pelatihan kewirausahaan, bimbingan manajemen usaha, penyediaan modal usaha, dan pemasaran produk.

Dengan demikian, peran Ormas dan LSM dalam memberdayakan masyarakat memberikan kontribusi positif mereka dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu dan kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini mencerminkan kontribusi penting Ormas dan LSM dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Perlindungan Lingkungan

Ormas dan LSM juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam proyek-proyek yang dilaksanakan, mereka telah mencapai dampak positif terukur, seperti pengurangan emisi CO₂, peningkatan pengelolaan lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam. Beberapa contoh proyek yang telah dilakukan oleh Ormas dan LSM di bidang lingkungan antara lain:

1. Proyek Restorasi Gambut yang dilakukan oleh LSM WALHI di Provinsi Riau. Proyek ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis dan sosial lahan gambut yang rusak akibat kebakaran hutan dan perkebunan sawit. Proyek ini telah berhasil menanam lebih dari 100.000 pohon di lahan gambut seluas 1.000 hektar. Selain itu, proyek ini juga telah mengurangi emisi CO₂ sebesar 1,5 juta ton per tahun. (WALHI, 2023a).
2. Proyek Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang dilakukan oleh LSM KPA di Provinsi Jambi. Proyek ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat dalam mengelola hutan secara lestari dan mengakses hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Proyek ini telah berhasil mengurus sertifikat hak ulayat untuk 12 desa di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, proyek ini juga telah meningkatkan pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan agroforestri, perkebunan karet, dan ekowisata (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2023).
3. Proyek Pencegahan Pencemaran Sungai yang dilakukan oleh Ormas Greenpeace Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari industri tekstil terhadap kualitas air sungai dan kesehatan masyarakat. Proyek ini telah berhasil mendorong 12 pabrik tekstil untuk berkomitmen menghentikan penggunaan bahan kimia berbahaya dan menggantinya dengan bahan ramah lingkungan. Selain itu, proyek ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengurangi limbah rumah tangga (Greenpeace, 2023).

Data ini menegaskan kontribusi yang signifikan dari Ormas dan LSM dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kontribusi ini mencakup pengurangan emisi CO₂, peningkatan pengelolaan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, yang semuanya merupakan elemen penting dari pembangunan berkelanjutan (WALHI, 2023a). Data-data ini memperkuat argumen bahwa Ormas dan LSM memainkan peran yang tak tergantikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberdayakan masyarakat secara efektif (Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2023).

Penelitian terdahulu yang mendukung temuan ini adalah studi Azhara (2023). Studi tersebut menegaskan bahwa "kesuksesan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara ini untuk menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan terhadap lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, peran Ormas dan LSM sebagai agen perubahan yang mendorong keseimbangan ini menjadi semakin penting. Pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan terhadap lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Penelitian tersebut mengakui bahwa Ormas dan LSM memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memberikan solusi alternatif untuk isu-isu pembangunan (Azhara, 2023). Selain itu, data-data dan temuan dari berbagai organisasi lingkungan dan pembangunan seperti Yayasan Lindungi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, dan Greenpeace Indonesia yang telah disebutkan dalam penelitian ini juga mendukung klaim bahwa Ormas dan LSM berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberdayakan masyarakat melalui proyek-proyek konkret (Bakesbangpol, 2023; Carley & Christie, 2017; LBH, 2023; Save the Children, 2023; Sukmawati & Maryanti, 2022; Wahana Visi Indonesia, 2023; WALHI, 2023b; WVI International, 2023).

Oleh karena itu, temuan penelitian ini konsisten dengan teori dan hasil empiris studi terdahulu yang juga menyoroti peran penting Ormas dan LSM dalam perlindungan lingkungan dan bagaimana peran ini relevan dengan upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan data empiris yang mendukung, penelitian ini memperkuat argumen bahwa Ormas dan LSM memiliki peran yang strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberdayakan masyarakat, yang merupakan aspek kunci dari pembangunan berkelanjutan di negara ini.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS). Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelestarian hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat. Ormas dan LSM memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS. Ormas dan LSM dapat berperan sebagai agen perubahan, fasilitator, advokat, pendamping, pengawas, dan mitra kerja pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan. Ormas dan LSM juga dapat memberikan kontribusi dalam hal pengetahuan, sumber daya, jaringan, dan inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa contoh partisipasi masyarakat yang berhasil ditingkatkan oleh Ormas dan LSM dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia (konsillsm.or.id, 2023):

1. Ormas dan LSM berperan dalam mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi dan anggaran yang besar kepada desa untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Ormas dan LSM membantu masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, mengelola dana desa, melaksanakan program-program pembangunan desa, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan desa. Ormas dan LSM juga membantu masyarakat desa dalam mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat kelembagaan desa. Beberapa contoh Ormas dan LSM yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Visi Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Yayasan Satunama (Konsil LSM, 2023; LBH, 2023; WALHI, 2023b; WVI International, 2023).
2. Ormas dan LSM berperan dalam mengembangkan dan mendukung inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Ormas dan LSM membantu masyarakat dalam mengakses informasi, pengetahuan, dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ormas dan LSM juga membantu masyarakat dalam mengadvokasi dan melindungi hak-hak masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mengatasi konflik-konflik yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Beberapa contoh Ormas dan LSM yang aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan adalah Walhi, Kemitraan, Sawit Watch, dan Yayasan Dian Desa (WALHI, 2023b; Yayasan Dian Desa, 2022).
3. Ormas dan LSM berperan dalam meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi masyarakat, khususnya kelompok-kelompok marginal dan rentan, seperti perempuan, anak-anak, kaum miskin, dan minoritas. Ormas dan LSM membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan politik dan demokrasi. Ormas dan LSM juga membantu masyarakat dalam mengakses informasi, menyuarakan aspirasi, dan mengawasi kinerja pemerintah dan penyelenggara pemilu. Beberapa contoh Ormas dan LSM yang aktif dalam meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi masyarakat adalah Perludem, Kemitraan Perempuan, Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Missi, dan Yayasan Pusaka (Perludem, 2023; Pusaka Indonesia, 2023).

Dapat dikatakan bahwa Ormas dan LSM telah berhasil meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia. Ormas dan LSM memberikan platform untuk masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta memberikan dukungan dalam hal pengetahuan, sumber daya, jaringan, dan inovasi. Ormas dan LSM juga berperan sebagai mitra kerja pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ormas dan LSM telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia. Ormas dan LSM memberikan platform untuk masyarakat terlibat dalam

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta memberikan dukungan dalam hal pengetahuan, sumber daya, jaringan, dan inovasi. Ormas dan LSM juga berperan sebagai mitra kerja pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia.

Pendapat ahli yang mendukung hasil penelitian tersebut antara lain. Menurut Sri Hidayati Djoeffan (2022), partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan strategi penting untuk mengatasi masalah pembangunan yang bersifat top down dan tidak berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat. Sri Hidayati Djoeffan (2022) juga menyebutkan bahwa UU No. 4 tahun 1982, UU Tata Ruang No. 24 tahun 1992, dan UU Otonomi No. 22 Tahun 1999 telah membuka peluang dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya di bidang tata ruang (Djoeffan, 2022). Menurut Asep Nurwanda², partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik memiliki manfaat seperti merangsang swadaya masyarakat, meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat, dan menyelaraskan pembangunan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Asep Nurwanda (2020) juga mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti konsultasi, kerjasama, kemitraan, dan pemberdayaan. Asep Nurwanda (2020) juga menyarankan agar pemerintah desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan desa, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi bagian yang sangat vital. Masyarakat bisa menjadi mitra atau malah menjadi pihak yang berpotensi berkonflik dengan pemerintah. Karena itu, keterlibatan masyarakat sering dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu program (Vanya Karunia Mulia Putri, 2021). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti konservasi partisipatif, pengelolaan hutan bersama masyarakat, dan hutan kemasyarakatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas, pemberian insentif, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan Ormas dan LSM dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Partisipasi masyarakat dapat memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, mekanisme, dan sektor, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari pemerintah, Ormas dan LSM, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia.

Pengawasan dan Akuntabilitas

Ormas dan LSM berkontribusi dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia. Ormas dan LSM memberikan masukan kritis dan melaporkan ketidaksesuaian atau masalah yang terkait dengan penggunaan dana publik, kualitas layanan publik, kepatuhan terhadap peraturan, dan dampak sosial dan lingkungan dari program pembangunan. Ormas dan LSM juga memastikan akuntabilitas pemerintah dan perusahaan terhadap masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terdampak atau terlibat dalam program pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa contoh pengawasan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Ormas dan LSM dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia, Ormas dan LSM berperan dalam mengawasi pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan larangan Ormas, serta mekanisme pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan Ormas oleh pemerintah. Ormas dan LSM juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan PP No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur tentang prosedur pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan Ormas, serta sanksi administratif dan pidana bagi Ormas yang melanggar ketentuan. Ormas dan LSM juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan PP No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan

oleh Warga Negara Asing, yang mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan kewajiban Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, serta mekanisme kerjasama antara pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing. Ormas dan LSM juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan Permen Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan pengawas Ormas, serta mekanisme pengawasan, pelaporan, dan evaluasi Ormas (Firdaus & Wafa, 2013; Konsil LSM, 2023; Wibowo & Harefa, 2015). Ormas dan LSM berperan dalam mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan desa yang menggunakan dana desa, yang merupakan alokasi anggaran pemerintah pusat yang diberikan kepada desa untuk membiayai kegiatan pembangunan desa sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Ormas dan LSM membantu masyarakat desa dalam mengawasi penggunaan dana desa, melaporkan temuan-temuan terkait dengan penyalahgunaan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian penggunaan dana desa, serta memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan dana desa. Ormas dan LSM juga membantu masyarakat desa dalam mengawasi kualitas dan dampak program-program pembangunan desa yang menggunakan dana desa, serta memberikan masukan dan evaluasi untuk pengembangan dan penyempurnaan program-program pembangunan desa (Firdaus & Wafa, 2013). Ormas dan LSM berperan dalam mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, seperti program infrastruktur, pertambangan, perkebunan, dan industri. Ormas dan LSM membantu masyarakat dalam mengawasi ketaatan perusahaan dan pemerintah terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti perizinan, analisis mengenai dampak lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ormas dan LSM juga membantu masyarakat dalam mengawasi dampak sosial dan lingkungan dari program-program pembangunan, seperti dampak terhadap hak-hak masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dampak terhadap keragaman hayati dan ekosistem, dan dampak terhadap perubahan iklim. Ormas dan LSM juga membantu masyarakat dalam mengadvokasi dan menuntut tanggung jawab perusahaan dan pemerintah terhadap dampak sosial dan lingkungan dari program-program pembangunan, serta memberikan solusi alternatif untuk mengatasi atau mengurangi dampak sosial dan lingkungan dari program-program pembangunan (Wibowo & Harefa, 2015).

Dapat dikatakan bahwa Ormas dan LSM berkontribusi dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia. Ormas dan LSM memberikan masukan kritis dan melaporkan ketidaksesuaian atau masalah yang terkait dengan penggunaan dana publik, kualitas layanan publik, kepatuhan terhadap peraturan, dan dampak sosial dan lingkungan dari program pembangunan. Ormas dan LSM juga memastikan akuntabilitas pemerintah dan perusahaan terhadap masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terdampak atau terlibat dalam program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ormas dan LSM berkontribusi dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia. Ormas dan LSM memberikan masukan kritis dan melaporkan ketidaksesuaian atau masalah yang terkait dengan penggunaan dana publik, kualitas layanan publik, kepatuhan terhadap peraturan, dan dampak sosial dan lingkungan dari program pembangunan. Ormas dan LSM juga memastikan akuntabilitas pemerintah dan perusahaan terhadap masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terdampak atau terlibat dalam program pembangunan.

Pendapat ahli yang mendukung hasil penelitian tersebut antara lain Catur Wibowo Budi Santoso dan Herman Harefa, pengawasan Ormas oleh pemerintah merupakan hal yang sangat penting dan mendesak, mengingat banyaknya Ormas yang bertindak anarkis dan mengganggu ketertiban masyarakat. Pengawasan Ormas oleh pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan administratif dan operasional. Pengawasan Ormas oleh pemerintah juga harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan Ormas lainnya. Pengawasan Ormas oleh pemerintah juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum (Wibowo & Harefa, 2015). Menurut Bambang Suharnoko Sjahrir, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan informasi, saran, kritik, dan masukan,

melakukan dialog, konsultasi, dan kemitraan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dan perusahaan, serta mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (Gunanjar et al., 2019). sedangkan Rizal Malik dan Dwi Astuti Astuti (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengawasan lingkungan hidup oleh masyarakat merupakan salah satu strategi untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pengawasan lingkungan hidup oleh masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas, seperti mengumpulkan dan menyebarkan informasi, melakukan analisis dan penilaian, melakukan advokasi dan kampanye, serta melakukan tindakan hukum dan sosial. Pengawasan lingkungan hidup oleh masyarakat juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan hidup, serta mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Astuti, 2022).

Dapat dikatakan bahwa pengawasan dan akuntabilitas Ormas dan LSM dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Pengawasan dan akuntabilitas Ormas dan LSM dapat memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan akuntabilitas Ormas dan LSM juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, mekanisme, dan sektor, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Pengawasan dan akuntabilitas Ormas dan LSM juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari pemerintah, Ormas dan LSM, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia.

Selain itu, implikasi dari hasil penelitian ini sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang dikemukakan oleh Arnstein (2019) yang menekankan pentingnya masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Peran Ormas dan LSM dalam menciptakan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, partisipasi aktif, dan akuntabilitas pemerintah menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi mitra yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris untuk konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan yang telah diperjuangkan oleh ahli seperti Arnstein, serta menegaskan bahwa Ormas dan LSM memiliki potensi untuk memperkuat pelaksanaan konsep ini di Indonesia (Arnstein, 2019).

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Ormas dan LSM juga perlu diperhatikan dengan cermat. Dalam menjalankan peran mereka dalam pembangunan berkelanjutan, Ormas dan LSM seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun sumber daya manusia. Isu-isu hukum juga dapat menjadi kendala, terutama ketika regulasi yang berlaku tidak selaras dengan tujuan mereka. Selain itu, terkadang Ormas dan LSM dapat bertentangan dalam pandangan atau kebijakan dengan pemerintah, yang bisa memunculkan konflik atau hambatan dalam bekerja sama. Namun, meskipun tantangan ini nyata, penelitian ini dengan tegas menegaskan bahwa manfaat yang dihasilkan oleh Ormas dan LSM jauh lebih besar daripada tantangan yang dihadapi. Kontribusi mereka dalam pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan advokasi untuk kepentingan publik telah membantu menciptakan dampak positif yang signifikan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, mengatasi tantangan ini dengan kerjasama antara Ormas, LSM, dan pemerintah serta dukungan dari masyarakat menjadi kunci untuk memaksimalkan peran penting mereka dalam memajukan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) ormas dan LSM memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Peran mereka mencakup pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, partisipasi aktif masyarakat, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah; (2) ormas dan LSM berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan program, seperti penyuluhan, pelatihan, advokasi, dan pengawasan. Mereka memiliki peran strategis dalam mengentaskan masalah sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan; (3) ormas dan LSM juga berperan

dalam perlindungan lingkungan melalui proyek-proyek konkret yang mengurangi emisi CO₂, meningkatkan pengelolaan lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam. Mereka telah berhasil menciptakan dampak positif yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan; (4) partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGS di Indonesia didorong oleh Ormas dan LSM. Mereka membantu masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta memberikan dukungan dalam hal pengetahuan, sumber daya, jaringan, dan inovasi; dan (5) ormas dan LSM juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan dan memastikan akuntabilitas pemerintah dan perusahaan terhadap masyarakat. Mereka memberikan masukan kritis, melaporkan ketidaksesuaian, dan menuntut tanggung jawab terkait dengan penggunaan dana publik, kualitas layanan publik, dan dampak sosial dan lingkungan dari program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhara, N. F. 2023. *Sustainable Development Discourses in Sustainability Reporting Practice in Indonesia*.
- Bakesbangpol. 2023. *Ormas Dan LSM Adalah Mitra Pemerintah Untuk Pembangunan*. Diakses melalui website <https://bakesbangpol.jatimprov.go.id/artikel/58/Ormas-dan-LSM-adalah-Mitra-Pemerintah-untuk-Pembangunan.html>
- Barnes, C. 2006. *Agents for change: Civil society roles in preventing war & building peace*. European Centre for Conflict Prevention The Hague.
- Bordens, K. S., & B, A. B. 2014. *Research Design and Methods a Process Appr*, Kenneth Bordens.
- Byrch, C., Kearins, K., Milne, M., & Morgan, R. 2007. Sustainable “what”? A cognitive approach to understanding sustainable development. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 4(1), 26–52.
- Carley, M., & Christie, I. 2017. *Managing sustainable development*. Routledge.
- Carson, Rachel, 1962, *Silent Spring*, Houghton Mifflin Harcourt, United States
- Creswell, J. W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed*. 3rd ed, Pustaka Pelajar
- Di Vaio, A., Hassan, R., Chhabra, M., Arrigo, E., & Palladino, R. 2022. Sustainable entrepreneurship impact and entrepreneurial venture life cycle: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*
- Djoeffan, S. H. 2022. Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(1), 54–77.
- Duran, D. C., Gogan, L. M., Artene, A., & Duran, V. 2015. The components of sustainable development—a possible approach. *Procedia Economics and Finance*, 26, 806–811.
- Ferrazzi, G. G. 2023. *Decentralization, local governance, and localizing the Sustainable Development Goals in Indonesia. Decentralization, Local Governance, and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific*, 253.
- Firdaus, M., & Wafa, M. A. 2013. Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Swadaya Masyarakat. *Jurnal Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(2), 125–138.
- Fitriandari, M., & Winata, H. 2021. Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(1), 1–13.
- Fowler, A. 2013. *Striking a balance: A guide to enhancing the effectiveness of non-governmental organisations in international development*. Routledge.
- Greenpeace. 2023. *Greenpeace Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/>
- Gunanjar, G. G., Nurhayati, S., Mujiyanto, & Rachman, Y. P. 2019. Pengawasan Dengan Partisipasi Masyarakat dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Pengawasan*, 1(1), 18–28.
- Hardianto, A. D., & Martono, B. A. 2022. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mendorong Pemberdayaan Untuk Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 12785–12976.
- Holloway, R. 2011. *NGO Corruption Fighters' Resource Book*. Washington, DC: NDI.
- Huberman, M., & Miles, M. B. 2012. *The qualitative researcher's companion*. Sage.
- Ife, J. 2013. *Community development in an uncertain world*. Cambridge University Press.

- Irawan, R. A. 2016. Memobilisasi Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat NU. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 1(1), 169–182.
- Irmayani, N. R., Jayaputra, A., Nainggolan, T., Mujiyadi, B., Erwinsyah, R. G., Suradi, S., Amalia, A. D., Habibullah, H., As' adhanayadi, B., & Iban, A. 2019. Pemetaan Sosial Menuju Desa Berketahanan Sosial Melalui Penyuluh Sosial Masyarakat Sebagai Agen Perubahan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Jansen, L. 2003. The challenge of sustainable development. *Journal of Cleaner Production*, 11(3), 231–245.
- Karjoko, L., Handayani, I., Jaelani, A. K., & Hayat, M. J. 2022. Indonesia's Sustainable Development Goals Resolving Waste Problem: Informal to Formal Policy. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(2).
- Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 2023. *Sinergi Membangun Hutan Sosial di Jambi*. <http://pskl.menlhk.go.id/berita/419-sinergi-membangun-hutan-sosial-di-jambi.html>
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2009. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Konsil LSM. 2023. CSR yang Berkelanjutan dan Akuntabilitas LSM. Konsil LSM. <https://konsillsm.or.id/2016/06/07/csr-yang-berkelanjutan-dan-akuntabilitas-lsm/>
- LBH. 2023. *Bantuan Hukum Gratis untuk Semua*. LBH Jakarta.
- Opschoor, H., & Van der Straaten, J. 1993. Sustainable development: an institutional approach. *Ecological Economics*, 7(3), 203–222.
- Save the Children. 2023. *Save the Children*. <https://savethechildren.or.id/>
- Suharyani, Y. D., & Djumarno, D. 2023. Perencanaan Strategis Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(2), 767–778.
- Sukmawati, D., & Maryanti, R. 2022. Development of education and economic circulation in supporting local potential as community empowerment efforts amid the Covid-19 pandemic. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 235–250.
- Vanya Karunia Mulia Putri, S. G. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Kompas Online. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/23/140422769/contoh-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan>
- Wahana Visi Indonesia. 2023. *SDG'S Wahana Visi Indonesia*. Wahana Visi Indonesia.
- WALHI. n.d.. *Program-Program WALHI*. WALHI. Retrieved September 26, 2023, from <https://www.walhi.or.id/>
- WALHI. 2023. Laporan Tahunan, <https://www.walhi.or.id/category/laporan-tahunan>
- Wibowo, C., & Harefa, H. 2015. Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.01-19>
- WVI International. 2023. *RE-ADVERTISE: Area Development Program (ADP) Manager, based in Van Chan district, Yen Bai province*, World Vision International. World Vision International. <https://www.wvi.org/re-advertise-area-development-program-adp-manager-based-van-chan-district-yen-bai-province>
- Yang, Q., Wang, Y., & Ren, Y. 2019. Research on financial risk management model of internet supply chain based on data science. *Cognitive Systems Research*, 56, 50–55.
- Zemans, J. 2004. *Advancing Cultural Diversity Globally: The Role of Civil Society Movements*. Global Flows, Dissent and Diversity: The New Agenda Conference, Toronto.